

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke-2, Oktober 2021 (tanggal 8 s.d. 14 Oktober)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

SMELTER DAN HILIRISASI INDUSTRI INDONESIA

Iwan Hermawan
Peneliti Muda/Kebijakan Ekonomi
iwan.hermawan@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Smelter PT Freeport Indonesia, yang sedang dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik Jawa Timur, akan menjadi *smelter* terbesar di dunia. Pembangunan konsentrat tembaga itu menggenapkan upaya pemerintah untuk mengembangkan hilirisasi industri. Namun demikian lokasi yang jauh dari daerah tambang, rendahnya integrasi sektor hulu dan hilir, hingga isu disparitas pendapatan menjadi tantangan yang dapat mereduksi intensi badan usaha dalam pembangunan *smelter*.

Hilirisasi industri melalui pembangunan *smelter* akan meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dan batubara (minerba), penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perkembangan industri ikutannya. Sejumlah potensi dampak positif itu dapat diraih jika dibarengi efisiensi produksi dan tata kelola perusahaan yang baik. Sebelum *smelter* PT Freeport Indonesia beroperasi, prediksi rendahnya daya saing sudah tampak yang disumbangkan dari: (a) biaya transportasi tinggi karena mendatangkan bahan baku dari Papua dan (b) lokasi *smelter* merupakan tanah reklamasi yang membutuhkan investasi besar. Oleh sebab itu, saat proyek *smelter* ini berjalan, biaya *Treatment Charge and Refining Charge* (TCRC) yang layak secara ekonomi diprediksikan mencapai 60 dolar AS per ton konsentrat. Sementara apabila bahan baku diolah di *smelter* lain hanya akan membutuhkan biaya TCRC 20 dolar AS per ton konsentrat sehingga selisihnya ditanggung perusahaan. Selain itu, ketika hasil *smelter* diekspor, muncul biaya pengiriman. Itu semua menurunkan margin pemasaran perusahaan *smelter*.

Oleh sebab itu, selain aksi bisnis yang harus efisien, pemerintah perlu membantu dengan: (a) penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga (K/L) untuk membangun infrastruktur, penyediaan energi, dan pemberian insentif fiskal, (b) pengembangan industri hilir (elektronik dan mobil listrik) dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan (c) kepastian bahan baku melalui dukungan data cadangan bahan baku yang valid.

SUMBER

Kompas, 13 Oktober 2021; Republika, 13 Oktober 2021; Media Indonesia, 13 Oktober 2021; sinpo.id, 3 Mei 2019.